

Wacana Kuasa dan Hegemoni: Kiai pada Sekolah Menengah Atas Negeri Kolaborasi dengan Pondok Pesantren

Agus Mursidi

Dosen Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Banyuwangi
agusmursidi@yahoo.co.id

Abstract

Implementation of regional autonomy provides an opportunity for educational development in areas such as the establishment of new schools both public and private. Educational development happens one of them is senior high school collaboration with pondok pesantren. This is due to the rapid advances in technology, globalization, and modernization moral fade students. Senior high school collaboration in operation went well, but there corruption caused hegemonic power relations and scholars from kiai. School curriculum hegemony by kiai scholars on the grounds of character development interests of students. In addition, scholars hegemony by kiai continues on admissions and runs on power relations are not permanent recruitment at the school. Sustainability of this condition will turn off the responsibility of the school to the student .

Keyword: Kiai, hegemony, SMA

Abstrak

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan sebuah peluang pengembangan pendidikan di daerah berupa pendirian sekolah-sekolah baru baik itu milik pemerintah maupun swasta. Pengembangan pendidikan yang terjadi salah satunya adalah sekolah menengah atas negeri kolaborasi dengan pondok pesantren. Hal ini dikarenakan pesatnya kemajuan teknologi, globalisasi dan modernisasi yang melunturkan akhlak siswa. Sekolah menengah atas negeri kolaborasi dalam operasionalnya berjalan dengan baik, namun terdapat penyelewangan yang disebabkan relasi kuasa dan hegemoni kiai. Kurikulum sekolah terhegemoni oleh kiai dengan alasan kepentingan pembangunan karakter siswa. Di samping itu, hegemoni kiai berlanjut pada penerimaan siswa dan relasi kuasa berjalan pada penerimaan pegawai tidak tetap di sekolah tersebut. keberlanjutan kondisi ini akan mematkan tanggung jawab sekolah terhadap siswa.

Kata kunci: kiai, hegemoni, SMA

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hal terpenting dimana setiap warga Indonesia berhak mendapatkannya sesuai dengan amanat UUD 1945 BAB XIII Pasal 31 ayat 1, 2 dan 3. Sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal 31 Ayat 2 yang berbunyi “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

Merujuk dari pasal tersebut, pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk mengasah pola pikir dan kemampuan manusia untuk menjadi lebih baik melalui pengajaran maupun pelatihan. Urgensi pendidikan mendorong pemerintah untuk ambil bagian dalam porsi yang lebih besar melalui kebijakan politik yang memberikan iklim kondusif bagi pertumbuhan, pemerataan, dan peningkatan kualitas pendidikan.

Pendidikan nasional sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, memiliki fungsi :

“...mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab”.

Tumbangnya orde baru membawa perubahan besar terhadap segala bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan khususnya pendidikan. Perubahan tersebut dinamakan sebagai orde reformasi. Dampak yang terlihat secara jelas dengan orde reformasi adalah reformasi pendidikan. Perubahan yang sangat menonjol adalah dilaksanakannya otonomi daerah sebagai implementasi dari UU No.22/1999 tentang pemerintahan daerah. Ditegaskan kembali dalam sebuah regulasi adalah kondisi UU No.2/1989 tentang sistem pendidikan nasional (UU SPN) yang menganut manajemen pendidikan sentralistis dan masih lebih menitik-beratkan penyelenggaraan pendidikan pada pemerintah, yang tidak lagi sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Jadi, implikasi dari hal tersebut seringkali terjadi pergantian sistem dan kurikulum pendidikan sesuai dengan kabinet yang berkuasa pada saat itu.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan sebuah peluang pengembangan pendidikan di daerah berupa pendirian sekolah-sekolah baru

baik itu milik pemerintah maupun swasta. Perkembangan pesat pada bidang pendidikan di suatu daerah berdampak terhadap sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga tak mengejutkan bila menjamur sekolah-sekolah milik pemerintah maupun swasta. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Banyuwangi, yang mengembangkan diri sebagai kabupaten pelajar seperti pada Kecamatan Banyuwangi dan Kecamatan Genteng.

Perkembangan pendidikan maju pesat ketika pemerintah Bupati Samsul Hadi, yang mana sekolah-sekolah berlomba-lomba meningkatkan sumber daya manusia baik guru dan siswa. Bersamaan dengan itu, terselip sebuah peluang dengan menekankan sebuah kekuasaan yang dipergunakan oleh sekelompok golongan. Relasi kuasa antara penguasa dan sekelompok golongan tersebut dipergunakan untuk mendirikan sekolah kolaborasi. Sekolah kolaborasi yang dimaksud adalah sekolah negeri di dalam pondok pesantren seperti SMAN 1 Singojuruh dengan Pondok Pesantren Darussholah.

Kemajuan teknologi yang dengan cepat menyebar di Banyuwangi, memberikan dampak positif dan negatif terhadap dunia pendidikan khususnya siswa sekolah menenga atas. Positifnya kemajuan teknologi adalah penyegaran pemikiran dan kreatifitas yang diperoleh dari kemajuan tersebut melalui internet, yang mana siswa dapat mendapatkan ilmu baru dan wawasan baru. Bagi siswa yang tak mampu menyaring dari kecanggihan teknologi, berdampak hal negatif yakni berpengaruh terhadap perilaku siswa yang banyak beredar di media massa ataupun elektronik seperti siswa bolos bermain game online dan pemerkosaan teman sebaya siswa karena video porno. Hal ini pula yang menjadikan faktor pendirian sekolah kolaborasi di Banyuwangi.

Pendirian sekolah kolaborasi dengan pesantren tak pelak melihat dari sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa yang tak luput dari tangan campur para kiai. Kiai merupakan pimpinan dari pesantren yang memiliki nilai-nilai patriotisme yang ditanamkan kiai telah berhasil menciptakan sebuah komunitas yang memiliki pemikiran kritis dan berani menampilkan sikap perlawanan terhadap kaum penjajah (Faesol, 2012). Inilah fakta sejarah yang membuktikan bahwa pesantren merupakan media yang sangat efektif dalam menanamkan nilai-nilai kehidupan (Faesol, 2011).

Pada awalnya pendirian sekolah kolaborasi tersebut bertujuan untuk mendirikan sekolah dengan sistem pendidikan umum dan agama agar siswa memiliki pengetahuan umum dan agama sehingga menghasilkan manusia berakhlak mulia. Sejalan dengan waktu, terdapat penyimpangan-penyimpangan pada pelaksanaannya. Penyimpangan yang terjadi adanya hegemoni kiai terhadap sistem sekolah. Hegemoni yang terjadi membawa dampak terhadap perubahan sistem rekrutmen siswa, pakaian sekolah, dan proses pembelajaran.

Terhegemoninya sekolah oleh kiai disebabkan masih adanya pandangan kuno yang dipergunakan. Kiai dianggap sebagai *broker atau agent of change* (Geertz) yang memiliki kredibilitas dan otoritas. Hal tersebut menjadikan kiai sebagai referensi sekaligus penentu dari perubahan-perubahan sosial keagamaan di pesantren sekitarnya. Sehingga menjadikan kiai merupakan figur yang disucikan dan dihormati karena dianggap sebagai lambang kewahyuan Ilahi. Pendapat dan fatwa-fatwanya dianggap selalu benar sehingga tidak boleh dikritik atau disangkal.

Dengan penggambaran di atas tentang proses hegemoni, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hegemoni

kelompok dominan (kiai) berhadapan dengan kelas subordinat (masyarakat sipil dan pendidikan) tentang pendidikan menengah umum berkolaborasi dengan pondok pesantren. Eksplorasi dan analisis dilakukan melalui berbagai sumber data seperti, dokumen, sekolah-sekolah dan wacana Undang-undang No 20 Tahun 2003 dan implementasinya. Penelitian ini juga penting dari perspektif *cultural studies* karena misi keberpihakannya pada kelompok subordinat dan posisi intelektual organik yang resisten terhadap dominasi dan kepemimpinan politik (Lubis, 2006; Gramsci, 1971).

Teori sosial kritis berpandangan bahwa dominasi (dalam masyarakat) bersifat struktural, dipengaruhi oleh institusi sosial yang lebih besar, seperti politik, ekonomi, budaya, ideologi, dan diskursus. Teori sosial kritis berupaya membongkar struktur yang mendominasi masyarakat dan memahami akar penindasan yang terjadi. Teori kritis juga berkeyakinan bahwa struktur dominasi diproduksi melalui kesadaran palsu manusia yang dilanggengkan melalui hegemoni (Gramsci) dan teori identitas. Dalam hal ini, teori kritis mencoba menyingkap kesadaran palsu tersebut (Lubis, 2006).

Dari uraian tersebut, terdapat beberapa hal yang akan dijadikan sebuah penelitian. Pertama, sistem pendidikan nasional tidak terlepas dari dinamika sosial, ekonomi dan politik yang dihasilkan dari orde Reformasi yang merujuk pada UU No. 20 tahun 2003. Kedua, merujuk dari UU No. 20 Tahun 2003 negara dengan institusi (pondok pesantren) menghegemoni masyarakat dan pendidikan menengah umum yang berada di sekitarnya yang kemudian menimbulkan permasalahan politik, sosial, ekonomi, dan budaya.

Penelitian yang dilakukan bertujuan secara umum adalah untuk

memahami bentuk-bentuk hegemoni kiai dan faktor-faktor yang mempengaruhi hegemoni kiai serta makna hegemoni kiai dalam sekolah menengah atas negeri negeri kolaborasi. Sedangkan, tujuan secara khusus adalah untuk memahami bentuk-bentuk hegemoni kiai terhadap sekolah negeri kolaborasi. Dengan mengetahui hegemoni kiai terhadap pendidikan, diharapkan dapat memberikan manfaat praktik dan teoritis. Manfaat secara praktis adalah penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk (1) memberikan pemahaman kepada pihak pemangku kepentingan dalam pendidikan untuk bersikap kritis terhadap sekolah kolaborasi dan kebijakan pendidikan dan (2) masukan bagi pemangku kepentingan dalam pendidikan nasional untuk memahami dan melaksanakan kebijakan pendidikan secara kritis dan inovatif dengan mempertimbangkan realitas sosial-kultural bangsa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang dapat “mendamaikan” kehidupan lokal. Sedangkan, secara teoritis adalah dapat menjelaskan permasalahan hegemoni kiai terhadap sekolah negeri kolaborasi dari perspektif kajian budaya. Penelitian ini diharapkan sebagai “pintu masuk” untuk meneliti permasalahan-permasalahan pendidikan dari perspektif teori-teori kritis kontemporer yang mengarah pada perubahan sosial dan paradigma pendidikan yang memerdekakan.

Sekolah Menengah Atas Negeri Kolaborasi

Pendidikan Sekolah Menengah Atas dalam penelitian ini merujuk pada Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dengan rumusan yakni, jenjang pendidikan sebagai lanjutan pendidikan dasar dan pendidikan menengah umum yang berbentuk sekolah menengah atas (SMA). Berbeda dari pendidikan menengah kejuruan, seperti Sekolah

Menengah Kejuruan (SMK), pendidikan menengah umum lebih diarahkan pendidikannya pada bidang akademik dan untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi.

Pendirian sebuah sekolah berlisensi negeri dari pemerintah bukanlah hal mudah. Setiap sekolah menengah atas swasta dapat dijadikan negeri dengan prasyarat yang telah ditetapkan pemerintah dalam Kepmendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah. Persyaratan tersebut adalah Surat Permohonan Pendirian SMA, surat akte yayasan, surat akte kepemilikan tanah, profil sekolah, data tenaga pengajar, tersedianya tempat kegiatan KBM, tersedianya tempat pengajar, tersedianya sarana dan prasarana, adanya peserta didik yang telah mengikuti KBM, dan denah sekolah.

Kolaborasi merupakan kerjasama pada suatu hal tertentu untuk memenuhi sebuah tujuan. Hal ini yang terjadi pada Sekolah Menengah Atas Negeri Kolaborasi, yang mana sekolah menengah atas negeri bekerja sama dengan pondok pesantren. Kerja sama yang terjadi fokus pada penanaman nilai-nilai agama dan moral dengan harapan mampu melahirkan siswa intelektual dan prilaku yang baik tanpa meninggalkan ajaran agama.

Kiai dalam Pesantren

Sistem pendidikan nasional pada hakikatnya mencari nilai tambah melalui pembinaan dan pengembangan SDM atau kualitas manusia secara utuh: jasmani dan rohani, ia juga harus secara terus menerus dikembangkan agar mampu melayani kebutuhan pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau dengan kata lain agar mampu menghadapi tantangan zaman. Upaya pengembangan sistem pendidikan nasional harus adil dilaksanakan dari

kandungan nilai-nilai sosial budaya bangsa terutama dari realita kependidikan yang telah hidup membudaya dalam kehidupan bangsa Indonesia agar tidak tercabut dari akarnya dengan demikian terdapat kesinambungan antara tradisional dan modern sebagai satu kesatuan dan berkelanjutan (Andriani, 2008).

Pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati dan mengajarkan agama islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari (Mastuhu, 1994). Di samping itu, pesantren dianggap ikut mencerdaskan bangsa karena ia merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan, keberadaan dan pengembang pesantren harus terus didorong oleh berbagai pihak (Amir, 2005).

Pengajaran yang diadakan pada pesantren ditekankan pada menekankan pada pendidikan dan ibadah. Selaras dengan tujuan tujuan pesantren bukanlah untuk mengejar kepentingan kekuasaan, uang, dan keagungan duniawi tetapi ditanamkan kepada mereka bahwa belajar adalah semata-mata merupakan kewajiban dan pengabdian pada Tuhan (Dhofier, 1982).

Pada pesantren terdapat elemen-elemen Islam yang paling pokok, yaitu: Pondok atau tempat tinggal para santri, masjid, kitab-kitab klasik, kiai dan santri” (Dhofier dalam Zarkasyi, 1965). Kelima elemen inilah yang menjadi persyaratan terbentuknya sebuah Pesantren. Masing-masing elemen tersebut saling terkait satu sama dengan lain. Dari elemen-elemen tersebut, kiai merupakan elemen sentral dalam pesantren.

Kiai merupakan lima dari satu elemen terpenting dalam pesantren yang dianggap memiliki segudang ilmu

pengetahuan dan moralitas tinggi. Kiai memiliki peran penting dalam upaya pengembangan pesantren dan pengembangan keilmuan para santrinya (Dhofier, 2007). Manfred Ziemek menempatkan kedudukan seorang Kiai sebagai pemimpin sentral yang berkuasa pernah di dalam pesantren. Di dalam bukunya “Pesantren dalam Perubahan Sosial”, bahwa dalam pesantren Kiai memiliki otoritas, wewenang yang menentukan semua aspek kegiatan pendidikan dan kehidupan agama atas tanggung jawabnya sendiri (Ziemek, 1986).

Keberadaan kiai dalam lingkungan pesantren laksana jantung bagi kehidupan manusia. Intensitas kiai memperlihatkan perannya yang otoriter, disebabkan karena kiai lah perintis, pendiri, pengelola, pengasuh, pemimpin, penanggung jawab, dan bahkan sebagai pemilik tunggal. Oleh sebab ketokohan di atas, banyak pesantren yang mundur disebabkan meninggalnya sang kiai. Sementara kiai tidak mempunyai keturunan atau penerus untuk melanjutkan usahanya. Sebagai contoh salah satu unsur dominan di pesantren, kiai mengatur irama perkembangan dan kelangsungan kehidupan suatu pesantren dengan keahlian, kedalaman ilmu, kharisma dan ketrampilannya. Sehingga tidak jarang sebuah pesantren tidak memiliki manajemen yang rapi. Kiai berfungsi sebagai sosok model atau teladan yang seluruh perilakunya dicontoh baik bagi para santrinya, keluarga para santri, maupun masyarakat sekitarnya.

Kewibawaan kiai dan kedalaman ilmunya adalah modal utama bagi berlangsungnya semua wewenang yang dijalankan. Hal ini memudahkan berjalannya semua kebijakan pada masa itu. Ia dikenal sebagai tokoh kunci. Kata-kata dan keputusannya dipegang teguh oleh mereka, terutama oleh para santri.

Meskipun demikian, dia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mendidik santrinya daripada hal-hal lainnya (Masdar, 1999).

(Kiai) sebagai pengajar Islam membuahkkan pengaruh yang melampui batas-batas desa dimana pesantren mereka berada (Dhofier, 1982). Dari kedua pendapat ulama' tersebut di atas dapat dipahami bahwa tugas Kiai tidak hanya mengajar di pesantren tetapi juga menanamkan nilai-nilai agama di masyarakat. Hal ini selaras dengan pendapat Abdur Rahman Wahid "Kiai pengasuh utama pesantren tidak hanya menjadi bapak dalam pesantren, tetapi bapak dalam masyarakat lingkungannya. (Mafred & Waligang, 1987).

Kiai sebagai ulama' artinya ia harus mengetahui, menguasai ilmu tentang agama Islam, kemudian menafsirkan ke dalam tatanan kehidupan masyarakat, menyampaikan dan memberi contoh dalam pengamalan dan memutuskan perkara yang dihadapi oleh masyarakat. Penguasaan ilmu tentang agama islam dan pemberian contoh akhlak terpuji, menjadi ide dasar sekolah menengah atas negeri kolaborasi dengan pesantren. Kolaborasi yang dilakukan dapat mewujudkan siswa yang berprestasi dan berakhlak terpuji ditengah gempuran kemajuan teknologi, modernisasi dan globalisasi.

Hegemoni, Analisis Wacana Kuasa dan Pengetahuan

Teori hegemoni dikemukakan oleh Gramsci yang lahir pada tanggal 22 Januari 1891 di Ales, Sardinia dan meninggal di Roma 27 April 1937. Gramsci mewariskan perubahan besar dalam berbagai perdebatan pemikiran dan teori perubahan sosial (Simon, 2004). Hegemoni menurut Gramsci (dalam Barker, 2004) berarti situasi di mana suatu blok historis faksi kelas berkuasa menjalankan otoritas sosial dan

kepemimpinan atas kelas-kelas subordinat melalui kombinasi antara kekuatan dan konsensus. Hegemoni dibentuk melalui serangkaian aliansi di mana suatu kelompok berposisi sebagai pemimpin. Gramsci menjelaskan bahwa hegemoni merupakan sebuah proses penguasaan kelas dominan kepada kelas bawah dan kelas bawah juga aktif mendukung ide-ide kelas dominan. Di sini penguasaan dilakukan tidak dengan kekerasan, tetapi melalui bentuk-bentuk persetujuan masyarakat yang dikuasai.

Dalam menjelaskan kelompok hegemon, Gramsci selalu menempatkan negara sebagai organ yang dapat menciptakan konsensus-konsensus di masyarakat elalui seperangkat peraturan perundang-undangan. Artinya, kelompok hegemon memanfaatkan negara untuk kepentingan kelompoknya sendiri dengan mengatasnamakan konsensus. Negara sendiri menyadari adanya kelompok hegemon sehingga negara berusaha mencari jalan tengah dengan mengakomodasi berbagai kepentingan yang berkembang di masyarakat. Hegemoni sendiri merupakan hasil proses hubungan sosial dan politik antarkelompok masyarakat.

Dimensi ekstra hegemoni inilah yang membuat Gramsci mampu merumuskan kembali pertanyaan menyeluruh mengenai hubungan antara kelas dengan kebudayaan, mengisyaratkan cara-cara yang dengannya "tanah lapang kebudayaan" menjadi suatu medan strategis bagi pembangunan bentuk-bentuk kesepakatan dan menerapkan cara-cara yang dengannya bentuk-bentuk ideologis dan kultural secara historis dinegosiasikan antara kelompok-kelompok dominan dengan subordinat (Faruk, 1994). Hegemoni adalah suatu organisasi konsensus. Penggunaan kekuatan koersif negara hanya sebagai pilihan terakhir ketika "kesadaran

spontan” menemui kegagalan. Lebih jauh hal ini menunjukkan bahwa hegemoni dapat mempengaruhi atau berdampak terhadap kehidupan pihak yang terhegemoni (Sukeni, 2010).

Diskusi tentang kekuasaan tetap penting terutama ketika umat manusia berkepentingan untuk terus menemukan cara bagaimana menyeimbangkan kekuasaan (Sheehan, 1996). Terwujudnya keseimbangan kekuasaan dapat berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Dengan perdamaian dunia akan menghilangkan segala perpecahan perang antar negara dan ketidakadilan yang sampai saat ini masih terjadi. Hal itulah yang sampai saat ini masih ditunggu oleh seluruh dunia adalah perdamaian, seandainya teori keseimbangan kekuasaan dapat terus diperbaiki.

Teori kekuasaan menjadi bahasan yang sangat menarik. Perkembangan teori kekuasaan tak lepas dari pemikiran Nietzsche dan Foucault. Nietzsche menilai bahwa filsafat politik tradisional selalu berorientasi pada soal legitimasi. Kekuasaan adalah sesuatu yang dilegitimasi secara metafisis kepada negara yang memungkinkan negara dapat mewajibkan semua orang untuk mematuinya. Namun menurut Foucault, kekuasaan adalah satu dimensi dari relasi. Di mana ada relasi, di sana ada kekuasaan (Best dan Kellner, 2003; Afandi, 2011).

Michel Foucault (1926-1984) dalam beberapa bukunya yang sangat terkenal dan berpengaruh dalam kajian budaya, seperti *The Archaeology of Knowledge* (1972), *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* (1977), dan *Power/Knowledge* (1980) memandang bahwa pengertian kekuasaan menyangkut ide-ide tentang wacana atau diskursus. Kekuasaan tidak dapat dilepaskan dari diskursus, khususnya diskursus ilmu pengetahuan sebagai sumber daya sekaligus bentuk kekuasaan

itu sendiri. Foucault sekilas tampak berbeda dan unik ketika intensif membahas kegilaan, struktur *episteme* klasik, rumah sakit, penjara, keburukan atau seksualitas (Visker, 1995; Afandi, 2011).

Foucault sebenarnya telah mengadopsi pemikiran Nietzsche (Best, 2003) tentang hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan, tetapi hubungan itu lebih banyak dianalisisnya secara sosiologis. Dalam genealogis kekuasaan, Foucault membahas bagaimana orang mengatur diri sendiri dan orang lain melalui produksi pengetahuan. Di antaranya, ia melihat pengetahuan menghasilkan kekuasaan dengan mengangkat orang menjadi subjek dan kemudian memerintah subjek dengan pengetahuan. Setiap subjek berhak memilih satu dan berhak menolak lainnya ketika berdasarkan naluri subjektifnya salah satu faktor dianggap lebih penting (Danaher, dkk, 2001).

Dasar pertimbangan digunakannya teori kekuasaan Foucault tersebut di atas adalah untuk mempertajam analisis rumusan masalah menyangkut seberapa jauh pengaruh hegemoni kiai terhadap sekolah menengah atas negeri kolaborasi terutama menyangkut relasi antara kekuasaan negara lewat penguasa pemerintahan maupun lembaga-lembaga formal seperti Departemen Agama. Relasi antara agama dan kekuasaan kiranya sesuatu yang mustahil sebab agama merupakan lembaga produksi kekuasaan-pengetahuan yang dahsyat terutama dalam masyarakat seperti di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan proses yang dilakukan secara bertahap, yakni dari perencanaan dan perancangan penelitian, menentukan fokus penelitian,

waktu penelitian, pengumpulan data, analisis, dan penyajian hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini ditulus dengan rancangan penelitian adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif secara umum didefinisikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, simbol, dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2002).

Tahap pengumpulan data merupakan tahap paling awal dalam penelitian ini, setelah menentukan obyek penelitian dan lokasi penelitian. Langkah selanjutnya adalah proses mendapatkan dan mengumpulkan data berkaitan dengan topik penelitian. Setelah data tersebut diperoleh, maka selanjutnya diperlukan teknik analisis data untuk menganalisis data tersebut. Teknik analisis data adalah suatu usaha untuk menyusun data yang telah diperoleh dalam penelitian untuk dapat ditafsirkan. Karena merupakan suatu proses, maka pelaksanaan analisis data telah dilakukan semenjak mulai mengadakan pengumpulan data di lapangan dan dikerjakan secara intensif sesudah meninggalkan lapangan.

Lokasi penelitian ini dilakukan pada SMAN kolaborasi yang terdapat di SMAN Darussholah Singojuruh Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, observasi, dan wawancara. Analisis data melalui tiga tahap, yaitu (1) reduksi data; (2) klasifikasi dan penyajian data; (3) penarikan simpulan.

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh landasan penulisan ilmiah, termasuk hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dimiliki untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Dokumen untuk mengetahui letak dan lokasi SMAN kolaborasi, hegemoni kiai dalam SMAN

kolaborasi baik secara bentuk maupun kebijakan yang dilakukannya.

Pengumpulan data dengan observasi bertujuan untuk mengamati secara langsung hegemoni kiai yang terjadi pada SMAN kolaborasi. Sedangkan, Wawancara dengan kiai untuk memperoleh data mengenai latar belakang pendirian pondok pesantren dan SMAN kolaborasi serta keikutsertaan dalam proses SMAN. Wawancara dengan guru dan siswa untuk memperoleh data tentang bentuk hegemoni kiai dalam pendidikan. Sedangkan, pelaksana pendidikan untuk memperoleh data hegemoni kiai dalam pengambilan kebijakan-kebijakan sekolah terutama ketika tahun ajaran baru.

Instrumen pada penelitian menggunakan *tape recorder*, pedoman wawancara dan peneliti sebagai tangan pertama. Sedangkan, dalam melakukan wawancara sebagai informan dipergunakan teknik purposive dengan rancangan penelitian adalah penelitian kualitatif deskriptif.

Hasil Dan Pembahasan

Pendirian SMA Negeri Kolaborasi awalnya bertujuan untuk membentuk siswa yang beragama, akhlak mulia dan berbudi pekerti. Semua hanyalah sebuah slogan belaka, terlihat dari beberapa kasus yang terjadi pada SMAN kolaborasi seperti terdapat siswa yang membolos ketika sholat bersama di pondok pesantren, menenggak minuman keras di sekitar lingkungan sekolah dan terdapat pula kejadian siswa yang berada pada kondisi hamil di luar nikah. Tidak terwujudnya tujuan awal pendirian SMAN kolaborasi dikarenakan otonomi sekolah yang seharusnya dikuasai penuh oleh kepala sekolah. Tetapi karena kepala sekolah dan pelaksana pendidikan di SMAN kolaborasi terhegemoni oleh kiai.

Menurut Foucault dalam *The Archaeology of Knowledge* (1977), kekuasaan menciptakan pengetahuan dan pengetahuan dapat menghasilkan kekuasaan secara produktif. Pengetahuan merupakan dampak dari hubungan kekuasaan-pengetahuan (relasional) dan perubahan-perubahannya dalam sejarah (Foucault, 1977).

Knowledge linked to power, not only assumes the authority of 'the truth' but has the power to make it self true. All knowledge, once applied in the real world, has effects, and in that sense at least, 'becomes true.' Knowledge, once used to regulate the conduct of others, entails constraint, regulation and the disciplining of practice. Thus, 'there is no power relation without the correlative constitution of a field of knowledge, nor any knowledge that does not presuppose and constitute at the same time, power relations (Foucault 1977).

Penguasaan pengetahuan yang berdampak pada kekuasaan yang secara produktif terlihat pada SMAN kolaborasi yang mana pengetahuan yang lebih mendalam terhadap pengetahuan agama secara tidak langsung memberikan kuasa tersendiri terhadap orang yang menjadi santri. Santri adalah seorang siswa yang mempelajari ilmu agama kepada seorang kiai di pondok pesantren. Beberapa orang penting menjadi santri dari kiai tersebut seperti kepala sekolah, beberapa orang pelaksana pendidikan dan masyarakat sekitar. Relasi kuasa yang terjadi dengan santi tersebut menjadikan sebuah situasi

baru berupa hegemoni terhadap SMAN kolaborasi. Relasi kuasa yang terjadi menjebak santri tersebut dalam hegemoni yang dilakukan oleh kiai.

Raymond William dalam bukunya *Key Words: A Vocabulary of Culture and Society* (1988) menjelaskan istilah hegemoni tidak terbatas pada pengertian bahwa negara melakukan kontrol politik secara langsung terhadap pihak subordinat tetapi juga dominasi bagaimana cara memandang dunia secara intelektual dan politis yang diungkapkan melalui berbagai institusi (William, 1988). Merujuk dari pendapat Raymon tersebut, kiai negara yang mampu melakukan kontrol terhadap SMAN kolaborasi dan subordinat adalah kepala sekolah, pelaksana pendidikan, masyarakat sekitar dan orang tua siswa yang memasukkan anaknya ke SMAN kolaborasi melalui pondok pesantren. Hegemoni kiai yang dilakukan berupa kontrol terhadap proses kurikulum, penerimaan pegawai tidak tetap, dan penerimaan siswa baru.

Terhegemoninya kurikulum SMAN kolaborasi oleh kiai terlihat dari adanya mata pelajaran yang berkaitan dengan pondok pesantren seperti mata pelajaran Bahasa Arab yang diwajibkan untuk kelas X, jam masuk 06.30 WITA yang diwajibkan siswa untuk membaca al-quran, adanya waktu sholat bersama pada waktu dzuhur dan sholat jum'at berjamaah bersama khusus siswa pria. Pada dasarnya tak ada yang keberatan terhadap adanya hal tersebut, namun yang merasakan hegemoni secara langsung adalah siswa. Siswa merasakan waktu proses pembelajaran yang lebih lama dengan adanya penambahan kegiatan tersebut.

Muncul sebuah pertanyaan bagaimana bagi siswa yang memiliki keyakinan non muslim. Bagi mereka yang memiliki keyakinan non muslim, terhegemoni dengan paksaan

menggunakan seragam sekolah yang mengidentikkan suatu agama yaitu berjilbab. Tak sekedar dari seragam sekolah saja, tetapi pada kegiatan agama yang dilaksanakan pihak pondok pesantren. Siswa yang non muslim dengan perintah dari kiai diwajibkan mengikutinya.

Relasi kuasa pun bekerja, saat terjadi perekrutan pegawai tidak tetap di SMAN kolaborasi. Perekrutan pegawai tidak tetap hanya dilakukan terhadap orang yang memiliki jalinan keluarga dengan kiai dan dapat terhegemoni oleh kiai dari segi pikiran serta prilaku. Pegawai dengan kriteria tersebut dimaksudkan dapat membantu kiai ke dalam sistem pendidikan yang terdapat di SMAN kolaborasi. Terlihat dari hal tersebut kekuasaan bukanlah pengaruh beroperasinya ideologi, melainkan hal-hal yang bersifat materillah (*material practices*) yang beroperasi secara relasional dan saling terjalin (menstruktur) dan berkelindan dengan berbagai jenis relasi lainnya sehingga menghasilkan kondisi (formasi diskursif) untuk mengontrol apa yang dapat ditulis, dipikirkan, dan dilakukan pada suatu bidang tertentu (Foucault. 1980; Storey, 2003).

Relasi kuasa yang berjalan pada sekolah yang khususnya kepala sekolah dikarenakan masih berlakunya nilai-nilai sosial di masyarakat tentang kiai. Nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat telah menyandera pikiran dan perilaku yang pada akhirnya memunculkan pola hubungan atas bawah antara kiai dan masyarakat yang telah dianggap santri. Kepercayaan bahwa "melawan" kiai apalagi sampai melakukan kritikan keras atas keputusan yang diambil akan menyebabkan kesengsaraan dalam hidup atau ilmu yang dimiliki akan sia-sia sehingga yang bersangkutan tidak akan menjadi orang yang berguna di masyarakat.

Perkembangan dalam pemenuhan hasrat di saat ada perubahan sistem penerimaan siswa baru melalui jalur online oleh dinas pendidikan dan jalur mandiri. Tujuan dari hegemoni tersebut tidak terlepas dari penyaluran hasrat yang berawal dari pondok pesantren yang sudah mulai kehilangan siswanya dengan adanya SMA Negeri yang didirikan di lokasi pondok pesantren membuat pondok pesantren menjadi memiliki siswa yang lumayan banyak. Tidak hanya dari penerimaan siswa SMA Negeri yang dipaksa juga untuk mengikuti proses pendidikan agama yang ada di pondok pesantren.

Khusus jalur mandiri yang berjumlah 30% dari pagu yang diterima masuk di SMAN kolaborasi diminta oleh pihak pesantren yang memenuhinya. Artinya bila siswa mau masuk ke SMAN kolaborasi harus yang elalui pondok pesantren dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi berapapun nilai yang dimiliki oleh siswa. Belum lagi dibebani biaya masuk pondok pesantren, biaya bulanan dan makan harus di pondok pesantren, mencuci pakaian tidak boleh di luar pesantren. Bila keluar dari pesantren maka siswa yang masuk ke SMA Negeri Kolaborasi melalui jalur mandiri akan dikeluarkan dari SMAN kolaborasi.

Penyebab hegemoni kiai dalam proses penerimaan siswa baru dikarena perubahan kuantitas santri yang terdapat pada pondok pesantren. Penurunan yang terjadi dikarenakan ketidakmampuan pondok pesantren dalam mengadopsi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini sedang berkembang. Seperti Dhofir mengatakan (1992) bahwa dominasi pesantren di dunia pendidikan mulai menurun secara drastis setelah tahun 1950-an. Salah satu faktor adalah lapangan pekerjaan "modern" mulai terbuka bagi warga Indonesia yang mendapat latihan di

sekolah-sekolah umum. Akan tetapi setelah proklamasi kemerdekaan pemerintah lebih memberikan perhatian terhadap sistem pendidikan nasional dgn membangun sekolah-sekolah umum dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

PENUTUP

Otonomi daerah yang diberlakukan memberikan dampak positif dalam dunia pendidikan yang mana setiap kabupaten berlomba dalam meningkatkan pendirian sekolah. Salah satunya adalah sekolah menengah atas negeri kolaborasi. Pendirian SMAN kolaborasi berawal dari kemajuan teknologi, globalisasi dan modernisasi yang berkembang pesat tanpa mampu siswa menyaringnya. Penyaringan yang kurang baik oleh siswa dari perkembangan tersebut melahirkan perilaku siswa kurang baik.

SMAN kolaborasi merupakan warna tersendiri dalam dunia pendidikan. Pada prosesnya terdapat dua kepemimpinan yang berkuasa yakni kepala sekolah dan kiai. Hanya saja relasi kuasa yang berjalan dan otoritas kiai mampu mengalahkan kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan belajar mengajar yang berjalan. Ini terlihat dari beberapa keputusan sekolah yang dianulir oleh kepentingan kiai.

Sekolah menengah atas negeri kolaborasi dalam operasionalnya berjalan dengan baik, namun terdapat penyelewangan yang disebabkan relasi kuasa dan hegemoni kiai. Kurikulum sekolah terhegemoni oleh kiai dengan alasan kepentingan pembangunan karakter siswa. Di samping itu, hegemoni kiai berlanjut pada penerimaan siswa dan relasi kuasa berjalan pada penerimaan pegawai tidak tetap di sekolah tersebut. keberlanjutan kondisi ini akan mematikan tanggung jawab sekolah terhadap siswa.

Daftar Pustaka

- Afandi, Khozin. 2011. *Konsep Kekuasan Michel Foucault*. Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam Vol. 01, No. 02, Desember 2011.
- Amir, Syafrudin. 2005. *Pesantren Sebagai Pembangkit Moral Bangsa*. www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/072006/03/11wacana01.htm. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2014.
- Andriani, Dini. 2008. *Pengembangan Kelembagaan Pesantren Sebagai Upaya Pengembangan Masyarakat (Studi Kasus Pondok Pesantren Miftahulhuda Al-Musri' Desa Kertajaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat)*. Bogor: IPB.
- Barker, Chris 2004. *Cultural Studies. Teori & Praktik*. Penerjemah: Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Best, Steven dan Kellner, Douglas. 2003. *Teori Postmodern: Interogasi Kritis, terj. Indah Rohmani*. Malang: Boyan Publishing.
- Danaher, Geoff. Schirato, Tony. dan Webb, Jen. 2001. *Understanding Foucault*. Delhi: Allen & Unwin.
- Dhofier, Zamakhsyari. 1982. *Tradisi Pesantren*. Jakarta: LP3S.
- , 1985. *Tradisi Pesantren*. Jakarta: LP3ES.
- , 1992. *Tradisi Tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES
- , 1997. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Kiai*. Cet. VII. Jakarta: LP3ES.

- , 2007. Kiai, Pesantren dan Tradisi Penelitian. *Reflektika; Jurnal Keislaman IDIA Prenduan*. Volume 4.
- Effendy, Bahtiar. 1998. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Faruk. 1994. *Pengantar Sosiologi Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faesol, ahmad. 2012. *Kiai, Otoritas Keilmuan dan Perkembangan Tradisi Keilmuan Pesantren*. Volume 15 Nomor 1 Juni 2012
- Faesol, Achmad . *Gaung Go Green dari Pesantren*. Harian Surya, 23 Maret 2011
- Foucault, M. 1980. *Power/Knowledge*. New York: Pantheon.
- Gramsci, A. 1971. *Selections from Prison Notebooks*. New York: International Publisher.
- Lubis, A.Y. 2006. *Dekonstruksi Epistemologi Modern: dari Posmodernisme, Teori Kritis, Poskolonialisme hingga Cultural Studies* Jakarta: Pusaka Indonesia Satu (PIS).
- Masdar, Umaruddin. 1999. *Membaca pikiran Gusdur dan Amin Rais tentang Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mastuhu. 1994. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. INIS: Jakarta.
- Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nyoman, Kutha Ratna. 2005. *Sastra dan Cultural Studies: Representasi Fiksi dan Fakta*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sheehan, Michael. 1996. *The Balance of Power: History & Theory*. London: Routledge.
- Storey, John. 2003. *Teori Budaya dan Budaya Pop, Memetakan Lanskap Konseptual "Cultural Studies"* (terj. oleh Dede Nurdin). Yogyakarta: Qalam.
- Sugiono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukeni, Ni Nyoman. 2010. *Hegemoni Negara dan Resistensi Perempuan dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Bali*. Denpasar : Udayana University Press.
- Syarif, Musthofa. 1982 . *Administrasi Pesantren*. Jakarta: Paryu Barkah.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Sinar Grafika, Jakarta.
- Waligang. 1987. *Dinamika Pesantren*. Jakarta: P3M.
- William, Raymond. 1988. *Key Words: A Vocabulary of Culture and Society*. London: Fontana Press.
- Yasmadi. 2002. *Modernisasi Pesantren, Kritik Nur Cholis Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional*. Jakarta: Ciputat Press.
- Ziemek, Manfred. 1986. *Pesantren Dalam Perubahan Sosial*. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M).

Riwayat Hidup

Nama : Agus Mursidi
 Tempat dan Tanggal Lahir : Banyuwangi, 10 Agustus 1978
 Pendidikan : S-2 Pendidikan Sejarah
 Pekerjaan : Tenaga Pengajar di Universitas PGRI Banyuwangi

Alamat : Dusun
Krajan Rt/Rw: 002/004
Desa
Gumirih Kecamatan Singojuruh
Kodepos
68464
Alamat bertugas : Jl. Ikan
Tongkol No. 1 Banyuwangi
E-mail :
agumursidi@yahoo.co.id
Nomor rekening bank : Bank
Mandiri 1430009041946